

Analisis Wacana Kritis pada Pidato Ahok di Kepulauan Seribu

¹Arif Bulan, ²Kasman

¹STKIP Yapis Dompus, Jalan Syech Muhammad Lingkar Utara Sawete Bali I, Dompus, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

²STISIP Mbojo, Jalan Tendean, Mandé, Mpunda, Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
email: arifbulan1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pidato Ahok yang kontroversial. Pidato yang disampaikan di Kepulauan Seribu tersebut, harus dilihat dari kapasitas Ahok sebagai kepala daerah yang memiliki kekuasaan dan ideologi tersendiri. Penelitian ini bukan bertujuan untuk melihat aspek benar dan salah dari pidato Ahok yang menyinggung surah Al-maidah ayat 51, namun penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis wacana ideologis; (2) menganalisis relasi wacana dan kekuasaan; dan (3) menganalisis implikatur yang muncul dari pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis. Sumber data dalam penelitian ini yaitu video pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Adapun data penelitian ini yakni penggalan transkripsi pidato Ahok. Video pidato tersebut diunduh dari laman *Youtube*. Analisis yang dilakukan tidak sakadara pada aspek tekstual saja, namun juga pada aspek kontekstual. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, terdapat: (1) unsur ideologi Islam dan ideologi feminisme dalam pidato Ahok; (2) hubungan kekuasaan dalam pidato Ahok; (3) implikatur sebagai model makna tersirat dalam pidato Ahok.

Kata Kunci: analisis wacana kritis, pidato Ahok, wacana dan ideologi, implikatur, Kepulauan Seribu

Abstract

The background of this research comes from a controversial speech of Ahok. Speech delivered in the Kepulauan Seribu must be seen from the capacity of Ahok as the head of a region that has its own power and ideology. This research are not intended to see the true and false aspects of Ahok's speech that alludes to Surah Al-maidah verse 51, but this study aims to: (1) analyze ideological discourse; (2) analyze discourse and power relations; and (3) analyzing the implicatures that emerged from Ahok's speech in Kepulauan Seribu. The approach used in this research is critical discourse analysis. Sources of data in this study is the video of Ahok's speech in Kepulauan Seribu. The research data is a fragment of transcription of speech Ahok. The video of the speech is downloaded from the Youtube page. The analysis is not only in the textual aspect but also on the contextual aspect. The results of this study can be concluded that there are: (1) elements of Islamic ideology and the ideology of feminism in Ahok's speech; (2) power relations in Ahok's speech; (3) implicatures as a model of meaning implied in Ahok's speech.

Keywords: ctitical discourse analysis, Ahok's speech, discourse and ideology, implicature, Kepulauan Seribu

PENDAHULUAN

Basuki Cahya Purnama atau biasa dikenal sebagai Ahok merupakan sosok yang paling kontroversial di tahun 2016. Pada rentang tahun 2016, Ahok dilaporkan ke polisi dan sedang menjalani sidang penistaan agama lantaran pidato yang disampaikan di Kepulauan Seribu, yang dinilai oleh sebagian orang, melecehkan agama Islam. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti. Penelitian ini tidak menelaah ihwal benar dan salahnya Ahok dalam pidatonya mengenai Surat Al-maidah ayat 51, namun tulisan ini akan mengkaji wacana atau pidato dari Ahok yang ditinjau dari segi keilmuan analisis wacana, dalam hal ini adalah analisis wacana kritis.

Pidato ialah bentuk kemampuan komunikatif yang memiliki tujuan menyampaikan sesuatu pesan pada khalayak ramai (Sidabutar, 2014). Dalam berpidato, khususnya pidato yang disampaikan oleh tokoh politik maupun kepala daerah seperti Ahok, sangat syarat dengan kepentingan, baik itu kepentingan pribadi, kelompok maupun kepentingan masyarakat. Berpidato artinya memproduksi bahasa atau wacana yang kemudian dapat ditafsirkan oleh para pendengar. Bahasa yang diproduksi oleh Ahok tentu memiliki fungsi, yang lebih dari fungsi komunikatif, misalnya fungsi persuasif, karena netral atau tidaknya bahasa bergantung pada siapa penuturnya (Ayuningtias & Hartanto, 2014, p.25).

Analisis wacana tidak semata-mata melihat hubungan semantis yang muncul dari pidato Ahok, namun lebih kepada wacana kritis yang ingin dilihat dari teks pidato Ahok. Pidato yang disampaikan di Kepulauan Seribu tersebut, harus dilihat dari kapasitas Ahok sebagai kepala daerah yang memiliki kekuasaan dan ideologi tersendiri. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Fairclough (2003) tentang hubungan wacana dengan ideologi dan kekuasaan (*power and ideology*).

Fokus penelitian ini adalah telaah pidato Ahok yang berkaitan dengan wacana yang disampaikan di Kepulauan Seribu. Hal ini melahirkan berbagai persepsi dan opini di masyarakat karena pada saat itu Ahok masih menjabat sebagai kepala daerah. Secara teoretik, persepsi dan opini lahir dari fenomena yang terjadi. Dalam pidato Ahok di Kepulauan Seribu juga memuat beberapa pandangan, berkaitan dengan wacana bahwa Ahok akan kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur pada Pilkada di Jakarta, oleh karena itu pidato di Kepulauan Seribu menarik untuk diteliti dari segi implikatur, ideologi dan kekuasaan. Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian ini yakni untuk menemukan unsur-unsur analisis wacana yang terkait dengan ideologi, kekuasaan, dan implikatur yang termuat dalam pidato Ahok.

Hakikatnya wacana merupakan kajian terhadap bahasa, baik berupa kata, klausa, frasa, kalimat dan bahkan wacana itu sendiri. Adapun analisis wacana kritis tidak hanya melihat pada tataran, kata, frasa, klausa dan kalimat, namun lebih kepada unsur-unsur di luar wacana itu sendiri. Analisis wacana kritis menjadi pendekatan yang umum dalam menganalisis teks tulis dan lisan, mulai dari *critical linguistics*, *critical semiotics* dan umumnya bisa dilihat dari studi sosio-politik yang diinvestigasi melalui bahasa, wacana dan komunikasi (Van Dijk, 1995, p.17). Analisis wacana kritis yang dimaksud oleh van Dijk tidak hanya fokus pada analisis teks-teks linguistik namun juga pada aspek lain seperti praktik sosial yang membentuk wacana tersebut. Dengan demikian, seperti yang pernah dituliskan oleh Rogers, Malancharuvil-Berkes, Mosley, Joseph, (2005) bahwa analisis wacana kritis harus menjawab pertanyaan antara hubungan bahasa dan praktik sosial,

namun Ulinuha, Udasmoro, dan Wijaya (2013) lebih menekankan analisis wacana kritis digunakan dalam pendekatan dan kerangka kajian sosial.

Fairclough (1995) mengemukakan bahwa analisis wacana kritis seharusnya mencakup analisis sosial praktis suatu teks atau sosial budaya yang ada di mana aktivitas komunikatif tersebut berlangsung. Dalam hal ini yang ditekankan oleh Fairclough adalah hubungan wacana dengan reproduksi nilai sosial, maupun adanya hubungan dan relasi kekuasaan terhadap pemroduksian teks maupun wacana. Lebih lanjut Fairclough (1995) menemukan hubungan faktor ekonomi, politik dan ideologi yang melatarbelakangi struktur dan bentuk wacana, sebagaimana Asmara (2016, p.381) menyebut ideologi dan kekuasaan tercermin dalam pemakaian kosakata, kalimat, dan struktur wacana.

Analisis wacana kritis adalah upaya penyelidikan yang dilakukan dengan menggunakan analisis contoh-contoh penggunaan bahasa dalam peristiwa komunikatif (Jorgensen & Phillips, 2007, p.130). Setiap peristiwa komunikatif berfungsi sebagai bentuk praktik sosial melalui hubungannya dengan tatanan wacana, sehingga ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu peristiwa komunikatif dan tatanan wacana (Fairclough, 1995). Peristiwa komunikatif berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam artikel surat kabar, film, video, wawancara atau pidato politik. Tatanan wacana berkaitan dengan jenis wacana yang digunakan dalam lembaga atau bidang sosial. Tatanan wacana juga mencakup tatanan media, sehingga tatanan wacana perlu memperhatikan medium yang digunakan dalam mereproduksi wacana tersebut.

Adapun ideologi merupakan makna yang melayani kekuasaan (Fairclough, 1995, p.14). Dalam hal ini Fairclough memaknai ideologi sebagai alat yang mengonstruksi nilai yang memberikan kontribusi terhadap hubungan dominasi terhadap kekuasaan. Hubungan dominasi lahir dari masyarakat yang memiliki ideologi yang sama, artinya bahwa ideologi memberikan sumbangsih yang besar terhadap hegomoni kekuasaan serta relasi kekuasaan. Ideologi bisa memberikan kontribusi terhadap pemertahanan kekuasaan serta mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan.

Tidak jauh berbeda dengan konsep ideologi yang dikemukakan oleh Fairclough, Thompson juga mengatakan bahwa ideologi sebagai praktik yang beroperasi dalam proses produksi makna dalam kehidupan sehari-hari, sebaliknya makna dimobilisasikan agar bisa mempertahankan hubungan-hubungan kekuasaan (Jorgensen & Phillips, 2007, p.140). Kesamaan konsep antara Fairclough dan Thompson tampak pada relasi ideologi terhadap usaha-usaha mempertahankan kekuasaan.

Selanjutnya, implikatur merupakan salah satu dari unsur eksternal wacana. Implikatur sangat membantu dalam hal memahami suatu wacana. Wacana terdiri dari wacana tulis dan wacana lisan. Dalam wacana lisan, dalam hal ini pidato elit politik, pasti termuat implikatur. Implikatur, dalam kamus linguistik terbagi menjadi tiga, yaitu implikatur pragmatik, implikatur percakapan dan implikatur konvensional (Kridalaksana, 2008, p.91). Masih mengutip pengertian dari kamus linguistik Kridalaksana, bahwa implikatur pragmatis adalah apa yang secara logis merupakan kesimpulan dari suatu ujaran, serta latar belakang apa yang diketahui bersama oleh pembicara dan pendengar dalam konteks tertentu. Selanjutnya, implikatur percakapan adalah makna yang dipahami tetapi tidak atau kurang tertangkap dalam apa yang diungkapkan. Adapun implikatur konvensional merupakan makna

yang dipahami atau diharapkan pada bentuk-bentuk bahasa tertentu tetapi tidak terungkap.

Grice menekankan bahwa implikatur merupakan ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan sebenarnya yang diucapkan (Mulyana 2004, p.11). Sesuatu yang berbeda tersebut adalah maksud pembicara yang tidak dikemukakan secara eksplisit. Dengan kata lain, implikatur adalah maksud, keinginan, atau ungkapan hati yang tersembunyi. Implikatur berkaitan erat dengan konvensi kebermaknaan yang terjadi dalam proses komunikasi (Nababan, 1987, p.28). Konvensi kebermaknaan dapat terjadi dalam bentuk pidato karena pendengar berusaha memaknai apa yang dimaksud oleh penyampai pidato. Berdasarkan apa yang diungkap oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa implikatur adalah sesuatu yang disampaikan oleh pembicara kepada pendengar, akan tetapi pembicara tidak secara eksplisit menyampaikan maksud dan tujuannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Sumber data dalam penelitian ini yaitu video pidato Ahok di Kepulauan seribu. Adapun data penelitian ini yakni penggalan transkripsi pidato Ahok. Video pidato tersebut diunduh dari laman *Youtube*. Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data, maka dilakukan transkripsi agar data valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap selanjutnya adalah interpretasi data. Interpretatif bermakna adanya proses yang berlandaskan pada pengetahuan, pengalaman, keyakinan serta asumsi peneliti berdasarkan wacana yang muncul dari pidato tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada subbab ini dianalisis (1) pemakaian kata, (2) ideologi, (3) komponen wacana kritis, (4) hubungan kekuasaan (*power relations*), dan (5) implikatur.

Analisis Pemakaian Kata

Analisis pertama yaitu pada pemakaian kata. Pidato Ahok di Kepulauan Seribu banyak menggunakan kata ganti orang (pronomina). Pronomina yang muncul adalah kata ganti orang pertama tunggal (saya), kata ganti orang pertama jamak (kita), dan kata ganti orang pertama jamak (kami), seperti dapat dilihat dalam data berikut.

- (1) "**Saya**, kalau ke pulau seribu, saya ingat kampung **saya**. Makanya, waktu **saya** turun, saya lihat pak lurah, **saya** panggil pak kades, karena tahunya kades".

Kata ganti pertama tunggal sangat banyak dipakai oleh Ahok. Kata ganti orang pertama tunggal tersebut mengacu pada pembicara itu sendiri, yaitu Ahok. Pemakaian kata ganti orang pertama tunggal "saya" mengindikasikan bahwa Ahok menonjolkan diri atau menunjukkan eksistensinya sebagai gubernur, yang dalam hal ini gubernur memiliki kapasitas di atas kepala desa atau lurah. Inilah yang disebutkan oleh Norton (1997) sebagai identitas sosial (*social identity*). Dalam ranah kajian dan analisis wacana kritis, bahwa penggunaan kata "saya"

menunjukkan hubungan kekuasaan dan dominasi Ahok sebagai sebagai kepala daerah yang tentu levelnya jauh di atas kades maupun lurah.

(2) "Seluruh dunia sudah berbicara budi daya dan **kita** dikaruniai tempat yang begitu luas".

Kata ganti 'kita' menunjukkan bahwa Ahok ingin mengajak atau melibatkan pendengar yang ada di kepulauan seribu. Kata 'kita' ditunjukkan sebagai persamaan rasa memiliki, yaitu sama-sama memiliki kepulauan seribu. Artinya Ahok, dalam hal ini, ingin melibatkan diri bahwa dia juga merasa dikaruniai, sehingga dalam teks ini ahok ingin melibatkan dirinya bersama pendengar.

(3) "...kami akan bagikan ke koperasi, **kami** gak ambil uang tapi sekarang gak bisa karena **kami** gak tau siapa.."

Jika pada penggalan data pertama, Ahok lebih menonjolkan dirinya sebagai gubernur, namun pada penggalan ketiga ini, Ahok melibatkan dirinya dengan anggota DPR, DPRD, Bupati, Kepala Dinas dan lurah. Kata 'kami' menunjukkan bahwa Ahok beserta jajarannya terlibat atau Ahok melibatkan para jajarannya dalam pidato yang disampaikan. Ini menunjukkan bahwa ada keterlibatan aspek kekuasaan yang dimunculkan oleh ahok, di mana ada ketidak setaraan antara jajaran pemerintah dengan para masyarakat (*audiences*).

Analisis Ideologi

Analisis yang kedua adalah analisis praktik ideologis (ideologi). Dalam pidato Ahok di kepulauan seribu, Ahok menggunakan strategi praktik ideologis. Ahok sangat memahami kondisi dan sebaran umat muslim yang ada di Kepulauan Seribu sehingga Ahok menggunakan salam pembuka yang menjadi ciri khas agama Islam. Adapun salam tersebut disajikan dalam data 4.

(4) "Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh"

Meskipun telah diketahui bahwa Ahok bukanlah muslim, namun dalam pembukaan pidatonya, Ahok menggunakan salam pembuka yang acap kali dilakukan oleh umat muslim. Bahkan Ahok tidak menggunakan salam pembuka dengan ciri khas Agamanya sendiri. Melihat data yang disajikan di atas, Ahok ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah pemimpin yang toleran, dapat berbaur dengan masyarakat yang pluralis dalam keyakinan beragama.

Ahok menyadari betul bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat muslim, sehingga untuk menghargai agama mayoritas tersebut Ahok memakai salam pembuka umat muslim. Terlepas dari itu, dalam acara tersebut Ahok telah menyatakan maju dalam pilkada Jakarta, maka hal tersebut dapat dikaitkan bahwa Ahok berusaha menarik simpati masyarakat dengan memakai praktik ideologi Islam dalam pembukaan pidatonya. Dalam konteks keindonesiaan, menurut penelitian yang dilakukan Firmanzah (dalam Alie, 2013, p.74) pemilih Indonesia cenderung memilih karena unsur/symbol keagamaan. Pembukaan pidato Ahok tersebut dapat dikorelasikan dengan unsur/symbol maupun ideologi keagamaan.

Selain ideologi agama, dalam pidato Ahok juga muncul ideologi feminisme. Ideologi feminisme ini merupakan gerakan perjuangan kesetaraan antara laki-laki

dan perempuan. Adapun penggalan data yang muncul dari pidato tersebut dapat dilihat dalam data 5.

- (5) "**Lalu bagaimana ibu-ibu?** Ini sedikit provokator ya, saya juga suami kan, saya juga laki-laki kok, **tapi kadang-kadang yang lebih rajin dan jujur itu ibu-ibu.** Jadi budidaya ini, bila perlu, kalo lakinya malas, kasih ke istrinya saja, biar suami gak berani macam-macam, ibunya punya duit, kaya loh, lu gak pulang juga nggak apa-apa, bila perlu ganti pemain baru, iya nggak? Punya duit, jadi ni, jaman emansipasi nih nggak mudah soal suami sama istri ini, macem-macem lu ditinggal juga lu".

Data 5 merupakan wacana yang merepresentasikan ideologi feminisme atau yang lebih dikenal dengan istilah *gender*. Isu gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan termuat dalam kesatuan wacana dalam data 5. Lalu, ada upaya penegasan dan meminta persetujuan kolektif ketika Ahok mengatakan "*iya nggak?*". Upaya tersebut adalah bagian dari pelibatan seluruh partisipan (*audience*) wanita untuk menyetujui isi pidato Ahok.

Analisis Komponen Wacana Kritis

Terdapat tiga komponen yang membentuk analisis wacana kritis, yaitu: (1) struktur sosial (kelas, status, usia, identitas, suku dan ras); (2) budaya; (3) dan penggunaan bahasa (Fairclough, 1995). Penggalan pidato Ahok yang merepresentasikan struktur sosial terdapat dalam data 6.

- (6) "Nah waktu **saya jadi bupati,** saya memimpikan, itu budidaya, karena manusia ini, makin lama makin banyak".

Kalimat 'saya jadi bupati' merepresentasikan saat Ahok menceritakan masa lalunya sebelum menjadi gubernur. Dalam data 6, ada struktur sosial yang muncul, baik berupa kelas sosial, status, sosial dan identitas sosial yang merupakan komponen analisis wacana kritis. Analisis ini didasari oleh *audience* yang merupakan masyarakat dengan status sosial yang lebih rendah dari Ahok.

Analisis Hubungan Kekuasaan (*Power Relations*)

Hubungan kekuasaan dengan wacana terlihat dari bahasa yang disampaikan oleh Ahok dalam pidatonya di Kepulauan Seribu. Ungkapan ini muncul di awal setelah salam pembuka, seperti dapat dilihat dalam data 7.

- (7) "Ini **yang saya hormati,** anggota DPR RI dari Dapil DKI, ketua DPRD DKI, ada pak Bupati, tentu juga kepala Dinas, kepala Biro, bapak-bapak dari kelautan dan perikanan, untuk semua tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu"

Dalam penggalan data 7, Ahok berusaha membuat hubungan kekuasaan secara sama dan merata dengan para *audience* yang hadir, data itu terlihat dari ungkapan 'yang saya hormati'. Ini menunjukkan bahwa Ahok berusaha bersifat

inferior (merendah diri) kepada *audience* yang hadir. Padahal sebagian yang hadir menjadi *audience* memiliki jabatan struktural yang lebih prestisius dari Ahok. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Ahok berusaha membuat *power relation* dengan seluruh hadirin.

Analisis Implikatur

Implikatur merupakan ungkapan yang memiliki makna yang berbeda dengan makna yang tersirat. Penggalan pidato Ahok dalam data 8 menggunakan kalimat yang mengandung makna tersirat berupa implikatur.

(8)“Saya selalu tegaskan sama bapak ibu juga jangan juga terpengaruh, ini urusannya dengan Pilkada ya, saya mau ingatin, kalo ada yang lebih baik dari saya, kerja lebih benar dari saya, dia lebih jujur dari saya, bapak ibu jangan pilih saya bapak ibu kalau pilih saya bapak ibu bodoh, masa kalo punya duit beli motor Jepang beli motor cina, mau nggak? Harganya sama beli motor Jepang atau beli motor Cina gua tanya? Motor Jepang dong, jadi kalo ada yang lebih bagus dari saya lebih baik dari saya, jangan pilih saya jadi gubernur bapak ibu, pilih dia. **Silakan tanding, jika ada yang lebih baik dari saya, terbukti lebih baik dari saya jangan pilih saya bapak ibu, sangat fair!**”

Makna yang tersirat dari penggalan wacana data 8, yaitu bahwa sebenarnya Ahok berharap para pendengar memilih Ahok saat Pemilihan, namun frasa ‘pilihlah saya’ tidak diungkapkan oleh Ahok. Implikatur dari tuturan tersebut yakni diharapkan pendengar pidato tersebut memaknai apa yang dimaksud oleh Ahok. Dalam konteks tersebut Ahok tidak mengatakan ‘pilih saya karena saya lebih baik’, dia sangat memahami bahwa konteks saat itu bukanlah momen kampanye, namun hanyalah momen kunjungan kerja. Itulah yang melatarbelakangi bahwa penggalan wacana dalam data 8 adalah wacana implikatur karena termuat keinginan tersirat dari pembicara.

PENUTUP

Dalam pidato Ahok tampak ideologi Islami dan ideologi feminis. Dalam pembukaan pidatonya, Ahok menggunakan salam pembuka yang acapkali dilakukan oleh umat Islam saat membuka pidato, dan bahkan Ahok tidak menggunakan salam pembuka dengan ciri khas agamanya sendiri. Dalam pidatonya tampak hubungan kekuasaan dari wacana yang dimunculkan Ahok, dapat dilihat bahwa Ahok berusaha membuat hubungan kekuasaan secara sama dan merata dengan para *audience* yang hadir. Model implikatur sebagai bentuk makna tersirat bahwa Ahok adalah pemimpin yang baik dan layak dipilih kembali juga tampak dalam pidatonya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alie, M. (2013). *Pemasaran politik di era multi media*. Jakarta: Mizan Publika.
Asmara, R. (2016). Strategi kebahasaan Presiden Jokowi dalam menanamkan ideologi dan manifesto pemerintahan. *LITERA*, 15(2), 379-388.

- Ayuningtias, D.I., & Hartanto, E.C.S. (2014). Pidato politik di Indonesia: sebuah kajian wacana kritis. *Prosidi*, 3(1), 25-38.
- Fairclough, N. (2003). *Discourse analysis: Textual analysis for social research*. London: Routledge.
- Fairclough, N. (1995). *Discourse and social change*. Cambridge: Blackwell Publisher.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: the critical study of language*. London and New York: Longman Inc.
- Jorgensen, M.W., & Phillips, L.J. (2001). *Discourse analysis: theory and method, alih bahasa Imam Suyitno, Lilik Suyitno & Suwarna*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karlberg, M. (2005). The power of discourse and the discourse of power: pursuing peace through discourse intervention. *International Journal of Peace Studies*, 10(1), 1-23.
- Kridalaksana, H. (2008). *Kamus linguistik* (ed. IV). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyana. (2004). *Kajian wacana: teori, metode & aplikasi prinsip-prinsip analisis wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nababan, P. J. W. (1987). *Ilmu pragmatik: ilmu dan penerapannya*. Jakarta: Depdikbud.
- Norton, B. (1997). Language, identity, and the ownership of English. *TESOL Quarterly*, 31(3), 409-429.
- Rogers, R., Malancharuvil-Berkes, E., Mosley, M., Hui, D., & Joseph, G.O. (2005). Critical discourse analysis in education: A review of literature. *Review of Educational Research*, 75(3), 365-416.
- Sidabutar, S.C. (2014). Pencitraan politik Abu Rizal Bakrie dalam teks pidato mendaki semeru dan teks pidato Indonesia dalam mimpi saya. *Jurnal E-Komunikasi*, 2(2), 1-11.
- Ulinuha, R., Udasmoro, W., & Wijaya, Y. (2013). Critical discourse analysis: Theory and method in social and literary framework. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 2(2), 262-274.
- Van Dijk, T. A. (1995). Aims of critical discourse analysis. *Japanese Discourse*, 1(1), 17-27.